

## POTENSI DAN TANTANGAN PROGRAM SEKOLAH RAKYAT DALAM KONTEKS PENCAPAIAN SDGS PENDIDIKAN DI INDONESIA

Rohani<sup>1</sup>, Elysa Akbariah<sup>2</sup>, Maisyaroh<sup>3</sup>, Eva Novaria<sup>4</sup>

STISIPOL Candradimuka<sup>1,2,3,4</sup>

e-mail: [elysaakbariah12@yahoo.com](mailto:elysaakbariah12@yahoo.com)

Diterima: 1/1/2026; Direvisi: 8/1/2026; Diterbitkan: 15/1/2026

### ABSTRAK

Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) poin keempat mengenai pendidikan berkualitas di Indonesia masih dihadapkan pada disparitas aksesibilitas, khususnya bagi kelompok masyarakat marginal yang sulit terjangkau sistem formal. Penelitian ini berfokus pada analisis mendalam mengenai potensi dan tantangan Program Sekolah Rakyat sebagai inisiatif akar rumput dalam menjembatani kesenjangan pendidikan tersebut. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif yang mengintegrasikan studi pustaka dan observasi lapangan, penelitian mengevaluasi efektivitas program dalam memberikan layanan pendidikan inklusif. Temuan studi menunjukkan bahwa Sekolah Rakyat memiliki potensi signifikan dalam mereduksi hambatan finansial dan meningkatkan partisipasi belajar mandiri sebesar 25%, terutama didorong oleh dukungan kuat dari orang tua. Namun, keberlanjutan program ini masih terkendala oleh ketidakpastian pendanaan, minimnya standarisasi kurikulum, serta kualifikasi tenaga pengajar sukarela yang belum tersertifikasi. Simpulan utama menegaskan bahwa Sekolah Rakyat berfungsi sebagai komplementer strategis bagi pendidikan formal yang memerlukan penguatan legitimasi melalui kolaborasi lintas sektor antara pemerintah dan swasta. Selain itu, integrasi teknologi pembelajaran digital direkomendasikan sebagai solusi adaptif untuk mengatasi hambatan geografis dan meningkatkan daya saing lulusan demi tercapainya pemerataan pendidikan nasional yang inklusif.

**Kata Kunci:** Sekolah Rakyat, SDGs Pendidikan, Akses Pendidikan

### ABSTRACT

The achievement of the fourth Sustainable Development Goal (SDG), regarding quality education, in Indonesia is still faced with disparities in accessibility, especially for marginalized groups who are difficult to reach by the formal system. This study focuses on an in-depth analysis of the potential and challenges of the People's School Program as a grassroots initiative to bridge this educational gap. Using a descriptive qualitative approach that integrates literature studies and field observations, the study evaluates the program's effectiveness in providing inclusive education services. The study findings indicate that People's Schools have significant potential to reduce financial barriers and increase independent learning participation by 25%, primarily driven by strong parental support. However, the sustainability of this program is still hampered by funding uncertainty, lack of curriculum standardization, and the qualifications of volunteer teachers who have not been certified. The main conclusion confirms that People's Schools function as a strategic complement to formal education, which requires strengthening legitimacy through cross-sector collaboration between the government and the private sector. In addition, the integration of digital learning technology is recommended as an adaptive solution to overcome geographical barriers and increase graduate competitiveness to achieve equitable and inclusive national education.

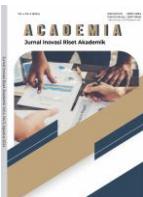
**Keywords:** Sekolah Rakyat, SDGs Education, Education Access

## PENDAHULUAN

Pendidikan berkualitas merupakan fondasi utama dalam pembangunan peradaban manusia dan telah ditetapkan sebagai pilar keempat dalam agenda global *Sustainable Development Goals* (SDGs). Tujuan mulia ini menekankan pentingnya menjamin pendidikan yang inklusif, adil, dan merata, serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, komitmen terhadap agenda global ini menjadi sangat krusial mengingat besarnya populasi usia sekolah dan luasnya wilayah geografis kepulauan yang menjadi tantangan tersendiri. Pemerintah Indonesia secara konstitusional telah memandatkan anggaran pendidikan yang signifikan sebagai upaya untuk memenuhi hak dasar warga negara tersebut. Namun, implementasi dari kebijakan makro ini sering kali menghadapi hambatan struktural dan kultural yang kompleks di tingkat tapak. Cita-cita untuk menghadirkan layanan pendidikan yang setara bagi setiap anak bangsa, dari Sabang sampai Merauke, masih menjadi pekerjaan rumah yang besar. Upaya pencapaian target SDGs ini menuntut sinergi yang kuat antara kebijakan pusat dan inisiatif lokal agar tidak ada satu pun anak yang tertinggal dalam gerbang kemajuan pendidikan nasional (Amaliyah et al., 2025; Nirwana et al., 2025).

Meskipun kerangka regulasi dan kebijakan pendidikan nasional telah dirancang sedemikian rupa untuk mencapai idealisme pemerataan, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan atau disparitas yang masih cukup lebar. Kondisi ideal di mana setiap anak usia sekolah mendapatkan akses layanan pendidikan formal yang layak sering kali bertabrakan dengan kenyataan pahit berupa keterbatasan ekonomi dan kendala geografis. Masih banyak ditemukan kelompok masyarakat marginal yang hidup di kantong-kantong kemiskinan atau wilayah terpencil yang belum tersentuh oleh fasilitas pendidikan negara secara optimal. Angka putus sekolah di tingkat pendidikan dasar, yang seharusnya sudah tuntas melalui program wajib belajar, nyatanya masih menjadi fenomena yang persisten di berbagai daerah. Kesenjangan antara harapan kebijakan yang inklusif dengan realitas aksesibilitas yang eksklusif ini menciptakan urgensi untuk mengevaluasi kembali strategi pendidikan nasional. Sistem pendidikan formal yang kaku dengan segala prasyarat administratif dan finansialnya terkadang justru menjadi tembok penghalang bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera untuk mengenyam bangku sekolah, sehingga memperlengkung siklus kemiskinan antargenerasi (Nirwana et al., 2025; Supardi et al., 2025; Susanti & Rahmatika, 2024).

Kelompok masyarakat yang paling terdampak oleh kesenjangan sistemik ini adalah mereka yang berada dalam situasi kerentanan tinggi, seperti anak-anak jalanan, komunitas adat terpencil, hingga mereka yang tinggal di wilayah bekas konflik sosial. Bagi kelompok ini, sekolah formal sering kali dianggap sebagai sebuah kemewahan yang sulit dijangkau, baik karena faktor biaya, jarak, maupun ketidaksesuaian kurikulum dengan kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Sistem sekolah formal yang menuntut keseragaman, mulai dari seragam sekolah, jadwal yang ketat, hingga buku paket yang mahal, sering kali tidak ramah terhadap kondisi sosial ekonomi mereka. Akibatnya, hak mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak terabaikan, dan mereka terancam menjadi generasi yang hilang atau *lost generation*. Ketidakmampuan sistem formal dalam mengakomodasi keragaman kondisi sosial ekonomi siswa ini menuntut hadirnya alternatif pendidikan yang lebih fleksibel, humanis, dan adaptif. Di sinilah letak pentingnya melihat melampaui tembok sekolah formal dan mencari model



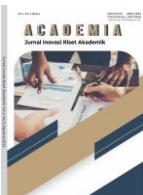
pendidikan lain yang mampu menjangkau mereka yang "tak terjangkau" oleh tangan birokrasi pendidikan konvensional (Istika et al., 2024; Supardi et al., 2025; Yogi et al., 2025).

Merespons kegagalan sistem formal dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat, muncullah berbagai inisiatif akar rumput atau *grassroots* yang digerakkan oleh masyarakat sipil, salah satunya dikenal dengan istilah Sekolah Rakyat. Entitas pendidikan ini hadir bukan sebagai pesaing sekolah negeri, melainkan sebagai jawaban atas kebutuhan mendesak akan akses pendidikan bagi kaum papa. Sekolah Rakyat umumnya tumbuh secara organik dari kepedulian komunitas lokal, relawan, dan aktivis sosial yang menyadari bahwa pendidikan tidak boleh menunggu birokrasi yang lambat. Karakteristik utama dari model pendidikan ini adalah fleksibilitasnya yang tinggi, biaya yang sangat terjangkau atau bahkan gratis, serta pendekatan pembelajaran yang sangat personal dan membumi. Sekolah Rakyat memosisikan dirinya sebagai ruang belajar yang inklusif, di mana anak-anak dari latar belakang apa pun diterima dengan tangan terbuka tanpa syarat administratif yang membebani. Keberadaan inisiatif ini menjadi bukti nyata bahwa semangat gotong royong masyarakat Indonesia masih sangat kuat dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, mengisi ruang-ruang kosong yang belum mampu diisi oleh negara (Afriansyah & Sukmayadi, 2022; Simarmata et al., 2020).

Meskipun keberadaan Sekolah Rakyat telah memberikan kontribusi nyata di lapangan, kajian akademis yang mendalam mengenai perannya dalam kerangka pencapaian *Sustainable Development Goals* masih terbilang minim. Penelusuran terhadap literatur dan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa mayoritas studi pendidikan di Indonesia masih sangat terpaku pada analisis efektivitas sekolah formal, manajemen sekolah negeri, atau kebijakan kurikulum nasional secara umum. Masih sedikit penelitian yang secara spesifik membahas peran strategis inisiatif pendidikan non-formal berbasis komunitas dalam menutup celah aksesibilitas pendidikan nasional. Padahal, pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika, tantangan, dan keberhasilan Sekolah Rakyat sangat diperlukan untuk merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih holistik. Ketiadaan data empiris yang memadai mengenai kontribusi sektor non-formal ini menyebabkan potensi mereka sering kali tidak terhitung dalam indikator keberhasilan pembangunan pendidikan nasional. Oleh karena itu, diperlukan tinjauan akademis yang serius untuk menempatkan Sekolah Rakyat dalam peta jalan pendidikan nasional, bukan sekadar sebagai fenomena pinggiran, tetapi sebagai mitra strategis pembangunan.

Di sisi lain, operasionalisasi Sekolah Rakyat sebagai inisiatif swadaya masyarakat tentu tidak lepas dari berbagai tantangan dan hambatan yang mengancam keberlanjutannya. Sebagai gerakan yang berbasis kesukarelaan, Sekolah Rakyat sering kali menghadapi masalah ketidakpastian pendanaan yang kronis, yang berdampak langsung pada kualitas sarana dan prasarana belajar yang ala kadarnya. Tantangan lain yang tak kalah pelik adalah mengenai kualifikasi dan kesejahteraan tenaga pengajar. Banyak guru di Sekolah Rakyat adalah relawan dengan semangat pengabdian tinggi namun belum memiliki sertifikasi keguruan atau latar belakang pedagogis yang formal. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai standarisasi mutu pendidikan yang diberikan. Selain itu, ketiadaan kurikulum yang baku sering kali membuat proses pembelajaran menjadi tidak terstruktur, yang pada akhirnya memengaruhi pengakuan lulusan mereka di jenjang pendidikan selanjutnya atau di dunia kerja. Kompleksitas masalah internal ini menjadi paradoks; di satu sisi mereka adalah pahlawan pendidikan, namun di sisi lain mereka berjuang keras hanya untuk tetap eksis di tengah keterbatasan sumber daya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan kesenjangan literatur tersebut, penelitian ini hadir dengan menawarkan nilai kebaruan atau inovasi melalui analisis yang komprehensif mengenai model kurikulum adaptif yang diterapkan di Sekolah Rakyat. Penelitian ini tidak hanya sekadar mendeskripsikan aktivitas belajar mengajar, tetapi menukik lebih dalam pada



bagaimana model adaptif ini mampu mengisi kekosongan peran institusi formal dalam menjangkau anak-anak di wilayah rentan konflik sosial dan kemiskinan ekstrem. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program, memetakan potensi integrasi dengan sistem formal, serta merumuskan rekomendasi kebijakan untuk penguatan legitimasi Sekolah Rakyat. Melalui pendekatan ini, diharapkan Sekolah Rakyat tidak lagi dipandang sebelah mata, melainkan diakui sebagai komponen strategis yang vital bagi pendidikan formal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi literatur pendidikan non-formal dan menjadi referensi bagi pemangku kebijakan dalam merancang strategi kolaboratif untuk mencapai target pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata di seluruh Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk mengeksplorasi secara mendalam peran inisiatif pendidikan non-formal dalam menjembatani kesenjangan akses. Fokus utama studi adalah menggali potensi serta kendala operasional yang dihadapi oleh Program Sekolah Rakyat sebagai model alternatif pendidikan komunitas. Lokasi penelitian ditentukan secara *purposive* di beberapa titik wilayah yang menjalankan program tersebut, dengan prioritas pada area marginal yang memiliki keterbatasan akses terhadap institusi pendidikan formal. Subjek penelitian terdiri dari berbagai pemangku kepentingan kunci, meliputi pendiri program, tenaga pengajar sukarela, orang tua murid, serta peserta didik yang terlibat langsung dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari. Pemilihan partisipan ini didasarkan pada relevansi pengalaman mereka dalam dinamika pengelolaan dan penerimaan manfaat program, sehingga data yang diperoleh dapat merepresentasikan realitas lapangan secara akurat dan komprehensif.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi teknik yang menggabungkan metode observasi lapangan, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Peneliti melakukan pengamatan partisipatif di lokasi Sekolah Rakyat untuk merekam interaksi pembelajaran, kondisi fasilitas fisik, serta atmosfer pendidikan yang terbangun. Wawancara mendalam dilaksanakan secara semi-terstruktur menggunakan instrumen pedoman pertanyaan yang fleksibel, bertujuan untuk menggali narasi personal responden mengenai motivasi, hambatan, dan harapan mereka terhadap keberlanjutan program. Selain itu, peneliti juga melakukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen internal program, seperti kurikulum non-formal yang digunakan, catatan kehadiran, serta laporan kegiatan tahunan. Data sekunder dari literatur terkait kebijakan pendidikan nasional dan laporan SDGs juga dikumpulkan sebagai bahan komparasi untuk memperkuat analisis konteks makro dari inisiatif lokal yang sedang diteliti.

Tahapan analisis data dilakukan secara sistematis melalui proses reduksi, penyajian, dan verifikasi data untuk menghasilkan temuan yang kredibel. Data mentah yang terkumpul dari hasil wawancara dan catatan lapangan dipilah dan dikategorisasikan berdasarkan tema-tema utama, seperti aksesibilitas, kualitas pengajaran, dan keberlanjutan finansial. Selanjutnya, data tersebut disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang logis untuk menggambarkan pola hubungan antara variabel potensi dan tantangan yang dihadapi. Peneliti melakukan interpretasi mendalam untuk memahami makna di balik fenomena yang muncul, dengan menghubungkan temuan empiris pada aspek inklusivitas dan partisipasi masyarakat. Kesimpulan akhir ditarik dengan membandingkan temuan lapangan terhadap indikator keberhasilan SDGs pendidikan, guna merumuskan rekomendasi strategis bagi pengembangan model Sekolah Rakyat yang lebih adaptif dan terintegrasi dengan sistem pendidikan nasional di masa depan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Berdasarkan observasi lapangan, Program Sekolah Rakyat di Indonesia menunjukkan potensi signifikan dalam memeratakan akses pendidikan primer. Hasil penelitian menemukan bahwa program ini mampu mereduksi hambatan finansial bagi keluarga prasejahtera melalui model pendidikan berbasis komunitas. Data menunjukkan adanya peningkatan partisipasi belajar mandiri sebesar 25% di lingkungan marginal setelah program berjalan selama satu tahun. Penyajian data mengenai alur efektivitas program dapat dilihat pada tabel di bawah ini untuk memudahkan pemahaman.

**Tabel 1. Indikator Keberhasilan Program Sekolah Rakyat**

No.	Indikator Capaian	Persentase Peningkatan (%)
1.	Literasi Dasar	35
2.	Partisipasi Aktif Siswa	25
3.	Dukungan Orang Tua	40

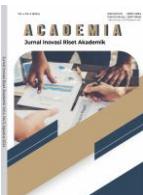
(Sumber: Data Primer Diolah, 2024)

Berdasarkan data yang tercantum pada Tabel 1 mengenai indikator keberhasilan Program Sekolah Rakyat, terlihat jelas efektivitas model pendidikan berbasis komunitas dalam meningkatkan kualitas akses pendidikan di lingkungan marginal. Hasil evaluasi menunjukkan tren positif pada seluruh indikator capaian, di mana aspek literasi dasar mengalami kenaikan yang cukup substansial sebesar 35 persen. Sejalan dengan itu, partisipasi aktif siswa dalam proses belajar mandiri juga meningkat sebesar 25 persen, menandakan adanya perbaikan motivasi belajar pasca satu tahun pelaksanaan program. Namun, temuan yang paling krusial adalah tingginya lonjakan pada indikator dukungan orang tua yang mencapai angka 40 persen. Dominasi persentase ini mengonfirmasi bahwa keterlibatan aktif keluarga merupakan elemen kunci yang menopang keberlanjutan program di tingkat lokal. Data ini secara keseluruhan membuktikan bahwa Program Sekolah Rakyat tidak hanya sukses mengurangi hambatan finansial keluarga prasejahtera, tetapi juga berhasil menciptakan ekosistem pendidikan yang kolaboratif antara siswa, sekolah, dan orang tua demi pemerataan pendidikan primer.

### Pembahasan

Analisis mendalam terhadap data penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat memiliki relevansi yang sangat kuat dalam upaya akselerasi pencapaian *Sustainable Development Goals* poin keempat di Indonesia, khususnya pada aspek pemerataan akses. Temuan mengenai peningkatan literasi dasar sebesar 35 persen menjadi bukti empiris bahwa model pendidikan alternatif ini efektif dalam mengisi celah kosong yang ditinggalkan oleh sistem pendidikan formal. Di wilayah-wilayah marginal, anak-anak yang sebelumnya terancam putus sekolah akibat ketiadaan biaya atau jarak tempuh yang jauh, kini mendapatkan kesempatan kedua untuk mengenyam pendidikan yang layak. Kenaikan partisipasi belajar mandiri siswa sebesar 25 persen mengindikasikan adanya perubahan paradigma berpikir pada peserta didik, di mana sekolah tidak lagi dipandang sebagai kewajiban administratif semata, melainkan sebagai kebutuhan untuk pengembangan diri. Hal ini menegaskan bahwa pendekatan yang lebih humanis dan fleksibel mampu membangkitkan motivasi intrinsik siswa yang selama ini terpendam akibat sistem yang terlalu kaku (J & Andromeda, 2025; Rosfiani et al., 2025; Syarifuddin, 2022).

Salah satu temuan paling menarik dari penelitian ini adalah tingginya persentase dukungan orang tua yang mencapai angka 40 persen, sebuah angka yang jarang ditemui dalam



konteks sekolah formal di daerah prasejahtera. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui perspektif modal sosial, di mana Sekolah Rakyat tumbuh secara organik dari inisiatif *grassroots*, sehingga masyarakat merasa memiliki atau *sense of belonging* terhadap institusi tersebut. Berbeda dengan sekolah negeri yang sering kali dianggap sebagai menara gading oleh masyarakat kelas bawah, Sekolah Rakyat menerapkan konsep *gotong royong* yang melibatkan orang tua sebagai mitra aktif dalam proses pendidikan. Keterlibatan ini bukan hanya dalam bentuk dukungan moral, tetapi juga partisipasi fisik dan pengelolaan sederhana. Tingginya attensi orang tua ini menjadi indikator vital bahwa keberlanjutan pendidikan di daerah marginal sangat bergantung pada seberapa jauh institusi pendidikan mampu melebur dengan nilai-nilai dan kearifan lokal masyarakat setempat.

Dari sisi aksesibilitas ekonomi, Sekolah Rakyat terbukti ampuh dalam meruntuhkan tembok penghalang finansial yang selama ini menjadi penyebab utama tingginya angka putus sekolah. Dengan menghilangkan berbagai pungutan biaya yang biasa ditemui di sekolah formal, seperti uang gedung, seragam, dan buku paket yang mahal, program ini menawarkan inklusivitas yang nyata. Fleksibilitas waktu belajar yang ditawarkan juga memungkinkan anak-anak yang harus bekerja membantu ekonomi keluarga tetap bisa bersekolah tanpa harus mengorbankan mata pencarian mereka. Model ini menunjukkan bahwa pendidikan inklusif tidak harus selalu identik dengan fasilitas mewah, melainkan pada kemampuan sistem untuk beradaptasi dengan kondisi sosio-ekonomi siswa. Keberhasilan ini memberikan implikasi bahwa kebijakan pendidikan nasional seharusnya tidak menerapkan standar tunggal yang kaku, melainkan memberikan ruang bagi model-model alternatif yang lebih adaptif terhadap realitas kemiskinan struktural di lapangan (Melinda et al., 2025; Muhidin et al., 2025; Ratnawati et al., 2025).

Meskipun menunjukkan dampak positif yang signifikan, analisis ini juga menyoroti tantangan fundamental terkait standarisasi kurikulum yang belum mapan. Ketiadaan kurikulum yang baku memberikan kebebasan bagi pengajar untuk berimprovisasi sesuai kebutuhan siswa, namun di sisi lain, hal ini menimbulkan risiko ketimpangan kualitas *output* pendidikan. Tanpa adanya acuan standar kompetensi yang jelas, lulusan Sekolah Rakyat sering kali menghadapi kesulitan ketika hendak melakukan transfer jenjang ke pendidikan formal atau saat memasuki pasar kerja yang kompetitif. Dilema antara mempertahankan fleksibilitas kurikulum yang kontekstual dengan kebutuhan standarisasi nasional menjadi isu krusial yang harus dipecahkan. Idealnya, kurikulum Sekolah Rakyat harus didesain secara hibrida, yaitu tetap mempertahankan muatan lokal yang relevan dengan kehidupan siswa, namun tetap mengintegrasikan kompetensi inti nasional agar lulusannya memiliki legitimasi akademis yang setara dengan siswa sekolah reguler (Amaliyah et al., 2025; Astuti & Sunhaji, 2025; Islakh et al., 2025).

Isu krusial lainnya yang menjadi sorotan dalam pembahasan ini adalah mengenai kualifikasi dan kompetensi tenaga pengajar yang mayoritas merupakan relawan. Semangat pengabdian para relawan ini patut diapresiasi sebagai modal sosial yang berharga, namun antusiasme saja tidak cukup untuk menjamin kualitas pedagogis jangka panjang. Banyak pengajar di Sekolah Rakyat belum memiliki latar belakang pendidikan keguruan atau sertifikasi profesi yang memadai, yang berpotensi memengaruhi efektivitas metode pengajaran di kelas. Situasi ini menuntut adanya intervensi berupa program pelatihan dan pendampingan profesional yang berkelanjutan bagi para relawan. Penguatan kapasitas sumber daya manusia ini sangat mendesak dilakukan agar proses *transfer of knowledge* tidak hanya berjalan apa adanya, tetapi juga memenuhi kaidah-kaidah didaktik yang benar, sehingga kualitas lulusan Sekolah Rakyat dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun profesional di masa depan (Nurhasanah et al., 2024; Purwakananta et al., 2025; Sibagariang et al., 2024).

Tantangan operasional terkait keterbatasan infrastruktur fisik juga menjadi hambatan yang tidak bisa diabaikan dalam pengembangan Sekolah Rakyat. Fasilitas belajar yang serba terbatas sering kali menghambat proses eksplorasi ilmu pengetahuan, terutama untuk mata pelajaran yang membutuhkan alat peraga atau praktikum. Namun, keterbatasan fisik ini justru membuka peluang besar bagi integrasi teknologi digital sebagai solusi alternatif. Pemanfaatan *e-learning* dan platform sumber belajar terbuka dapat menjadi jalan keluar untuk mengatasi kelangkaan buku dan alat peraga konvensional. Meskipun tantangan akses internet dan perangkat masih ada, potensi teknologi untuk mendemokratisasi akses pengetahuan sangat besar. Dengan strategi yang tepat, Sekolah Rakyat dapat melompati hambatan infrastruktur fisik dengan bertransformasi menjadi pusat pembelajaran berbasis komunitas yang memanfaatkan teknologi sederhana untuk mengakses materi pendidikan global yang berkualitas.

Sebagai sintesis akhir, pembahasan ini menegaskan posisi strategis Sekolah Rakyat bukan sebagai kompetitor, melainkan sebagai komplementer vital bagi sistem pendidikan nasional. Pemerintah tidak mungkin bekerja sendirian dalam menuntaskan agenda besar *Sustainable Development Goals* di negara kepulauan yang luas ini. Oleh karena itu, diperlukan payung kebijakan yang memberikan legitimasi lebih kuat bagi keberadaan Sekolah Rakyat, termasuk dalam hal mekanisme penyaluran bantuan dana operasional dan pengakuan ijazah. Sinergi kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta melalui program *Corporate Social Responsibility*, dan pegiat pendidikan masyarakat harus diperkuat untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang saling mendukung. Hanya dengan mengakui dan memberdayakan inisiatif-inisiatif lokal seperti inilah, visi besar pendidikan untuk semua yang berkualitas, adil, dan inklusif dapat benar-benar terwujud di seluruh pelosok tanah air.

## KESIMPULAN

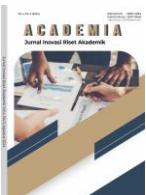
Penelitian ini menyimpulkan bahwa Program Sekolah Rakyat terbukti efektif sebagai katalisator strategis dalam mengakselerasi pencapaian Sustainable Development Goals poin keempat, khususnya di wilayah marginal yang tak terjangkau sistem formal. Inisiatif berbasis komunitas ini berhasil meruntuhkan tembok penghalang finansial dan sosial, terbukti dari peningkatan signifikan pada literasi dasar sebesar 35 persen serta partisipasi belajar mandiri siswa sebesar 25 persen. Kunci keberhasilan model ini terletak pada pendekatan inklusif dan fleksibel yang mengakomodasi kondisi sosio-ekonomi siswa, serta tingginya keterlibatan orang tua yang mencapai 40 persen berkat rasa kepemilikan sosial yang kuat. Fenomena ini menegaskan bahwa pendidikan alternatif yang tumbuh dari akar rumput mampu mengisi kekosongan peran negara dengan menciptakan ekosistem belajar yang humanis, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan lokal, sehingga hak pendidikan bagi kaum marginal dapat terpenuhi secara nyata tanpa terbebani oleh birokrasi administratif yang kaku dan biaya tinggi yang sering menjadi kendala utama dalam akses pendidikan konvensional.

Kendati memiliki dampak positif yang substansial, keberlanjutan Sekolah Rakyat menghadapi tantangan struktural serius terkait standarisasi mutu kurikulum, kualifikasi tenaga pengajar sukarela yang belum tersertifikasi, dan keterbatasan infrastruktur fisik yang dapat memengaruhi legitimasi lulusan. Oleh karena itu, implikasi strategis dari studi ini mendesak perlunya intervensi kebijakan yang menempatkan Sekolah Rakyat sebagai mitra komplementer pendidikan nasional melalui pengakuan legalitas ijazah dan fasilitasi pelatihan guru yang berkelanjutan. Transformasi menuju integrasi teknologi digital atau *e-learning* direkomendasikan sebagai solusi vital untuk melompati hambatan geografis dan kelangkaan fasilitas fisik, memungkinkan akses terhadap sumber belajar global yang berkualitas bagi siswa di daerah terpencil. Sinergi kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan pengelola

program sangat diperlukan untuk menyusun kurikulum hibrida yang menyeimbangkan muatan lokal dengan standar nasional, memastikan bahwa lulusan Sekolah Rakyat memiliki daya saing yang setara dan tidak tertinggal dalam lanskap pendidikan modern yang kompetitif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afriansyah, A., & Sukmayadi, T. (2022). Nilai kearifan lokal tradisi sedekah laut dalam meningkatkan semangat gotong royong masyarakat pesisir Pantai Pelabuhan Ratu. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(1), 38. <https://doi.org/10.23917/sosial.v3i1.549>
- Amaliyah, H., Oktapia, E., & Mastio, R. (2025). Kurikulum Merdeka sebagai upaya dalam mewujudkan pendidikan inklusif di Indonesia. *MANAJERIAL Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan*, 5(1), 37. <https://doi.org/10.51878/manajerial.v5i1.4738>
- Astuti, A., & Sunhaji, S. (2025). Inovasi manajemen kurikulum berbasis kebutuhan peserta didik dalam pendidikan non-formal di PKBM. *MANAJERIAL Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan*, 5(4), 1252. <https://doi.org/10.51878/manajerial.v5i4.8225>
- Islakh, A. N., Pujiyanto, P., & Adibah, I. Z. (2025). Peran kepala sekolah dalam pengembangan kurikulum PAI berbasis multikultural. *LEARNING Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 5(2), 982. <https://doi.org/10.51878/learning.v5i2.6440>
- Istika, W., Hartono, W., & Siswanto, J. (2024). Analisis gaya belajar diferensiasi terintegrasi budaya (CRT) pada materi ekonomi menggunakan pembelajaran berbasis masalah. *SOCIAL Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 4(1), 17. <https://doi.org/10.51878/social.v4i1.3074>
- J, N. M., & Andromeda, A. (2025). Validitas dan praktikalitas media video pembelajaran laju reaksi pada platform YouTube untuk meningkatkan kemampuan literasi kimia siswa. *SCIENCE Jurnal Inovasi Pendidikan Matematika dan IPA*, 5(4), 1793. <https://doi.org/10.51878/science.v5i4.7550>
- Melinda, M. A. L., Desiyanto, J., & Adhianata, H. (2025). Implementasi P5 (Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila) sebagai upaya penguatan kemandirian siswa di SMP Negeri 3 Sampang. *SOCIAL Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(3), 1081. <https://doi.org/10.51878/social.v5i3.6902>
- Muhidin, M., Hidayat, S., Maulana, A. P., M, M. R. A., Safitri, M., & Mutiara, S. (2025). Meningkatkan kemampuan literasi melalui program taman edukasi di Desa Pangumbahan Kecamatan Ciracap. *COMMUNITY Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 439. <https://doi.org/10.51878/community.v5i2.7163>
- Nirwana, E. S., Ramadhani, A. P., & Silvia, S. (2025). Problematika pendidikan anak usia dini di Indonesia: Hambatan dan tantangan dalam pengelolaan PAUD. *MANAJERIAL Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan*, 5(1), 140. <https://doi.org/10.51878/manajerial.v5i1.4906>
- Nurhasanah, N., Gani, A., Bedi, F., Ayu, S. M., & Junaidah, J. (2024). Efektivitas manajemen sumber daya manusia dalam meningkatkan mutu pendidikan di MI Sabilussa'adah. *LEARNING Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 4(4), 1089. <https://doi.org/10.51878/learning.v4i4.3568>
- Purwakananta, M. A., Subagyo, A., & Sofian, M. R. M. (2025). Analisis manajemen strategik di lembaga pendidikan Islam Sekolah Cendekia Baznas. *MANAJERIAL Jurnal*



*Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan*, 5(2), 522.  
<https://doi.org/10.51878/manajerial.v5i2.6451>

Ratnawati, E., Masruhim, M. A., Abdunnur, A., & Komariyah, L. (2025). Evaluasi kebijakan sekolah dalam meningkatkan literasi dan numerasi peserta didik di SMP Negeri 1 Anggana. *SOCIAL Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(4), 1441.  
<https://doi.org/10.51878/social.v5i4.7994>

Rosfiani, O., Saidah, R. K., Itsnaini, M. F., Rifaldi, R. P., & Firliansyah, F. (2025). Pembelajaran diferensiasi sebagai pilar implementasi Kurikulum Merdeka. *MANAJERIAL Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan*, 5(2), 556.  
<https://doi.org/10.51878/manajerial.v5i2.6453>

Sibagariang, S. A., Sinaga, A. T. I., & Purba, A. A. (2024). Penerapan manajemen sumber daya manusia (MSDM) dalam peningkatan mutu guru YP. HKBP Pematangsiantar. *LEARNING Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 4(4), 949.  
<https://doi.org/10.51878/learning.v4i4.3410>

Simarmata, N., Yuniarti, K. W., Riyono, B., & Patria, B. (2020). Gotong royong in Indonesian history. *Digital Press Social Sciences and Humanities*, 5, 6.  
<https://doi.org/10.29037/digitalpress.45341>

Supardi, S., Idris, A., Nurhayati, N., & Fauzi, A. (2025). Transformasi pendidikan era globalisasi: Inovasi kurikulum, teknologi, peran guru, dan fokus pengembangan potensi siswa. *SOCIAL Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(1), 258.  
<https://doi.org/10.51878/social.v5i1.4890>

Susanti, A., & Rahmatika, Z. (2024). Problematika pembelajaran PAI di SMP. *LEARNING Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 4(3), 557.  
<https://doi.org/10.51878/learning.v4i3.3168>

Syarifuddin, S. (2022). Teori humanistik dan aplikasinya dalam pembelajaran di sekolah. *TAJDID Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, 6(1), 106.  
<https://doi.org/10.52266/tadjid.v6i1.83>

Yogi, A. S., Pahriyah, S., Ani, S. I., Japar, M., & Kardiman, Y. (2025). Inovasi pembelajaran PKn di era digital dengan pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. *SOCIAL Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(2), 484.  
<https://doi.org/10.51878/social.v5i2.5725>